

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli Secara Umum**

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>15</sup>

##### **2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli**

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:<sup>16</sup>

###### **1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, hlm. 243

<sup>16</sup> Komariah, 2016, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, hlm. 148

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU No. 1 tahun 1974, ketentuan ini tidak berlaku lagi)

## 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian

## 4. Suatu sebab yang halal

Sebab atau *causa* ini yang dimaksudkan undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau *causa* tidak berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud. Sebagai contoh: jual beli barang hasil curian adalah merupakan perjanjian yang sebab atau *causanya* tidak halal.

## 3. Para Pihak dalam Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pihak dalam jual beli sekurang-kurangnya harus ada dua orang, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak penjual dan yang lain menjadi pihak pembeli. Penjual dan pembeli

itulah yang menjadi subjek jual beli. Pembeli mempunyai hak atas prestasi dan penjual wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap pembeli.<sup>17</sup>

Jual beli adalah perjanjian timbal balik, baik penjual maupun pembeli sesuai dengan teori dan praktek hukum yang terdiri dari, yaitu:<sup>18</sup>

a. *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu

Subjek jual beli berupa orang atau manusia harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah. Seseorang harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, tidak lemah pikirannya, tidak berada dibawah pengampuan atau perwalian. Apabila anak belum dewasa, orang tua atau wali dari anak tersebut yang harus bertindak.

b. *Rechts persoon* atau badan hukum

Subjek jual beli yang merupakan badan hukum, dapat berupa koperasi dan yayasan. Koperasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri. Sedangkan yayasan adalah suatu badan hukum dilahirkan oleh suatu pernyataan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, yayasan bertindak pendukung hak dan kewajiban tersendiri.

c. *Persoon* yang dapat diganti

---

<sup>17</sup> R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 5

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16

Mengenai *persoon* kreditur yang dapat diganti, berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah ditetapkan dalam perjanjian, sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur baru. Perjanjian yang dapat diganti ini dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian “*aan order*” atau perjanjian atas perintah. Demikian juga dalam perjanjian “*aan tonder*” atau perjanjian atas nama.

#### **4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli**

##### **a. Hak Penjual**

Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui jasa perantara ini adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang ia jual. Menurut Pasal 1513 KUHPerdata menjelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti pada umumnya. Kemudian pada Pasal 1517 KUHPerdata diatur juga jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267. Pembatalan jual beli dapat dilakukan oleh penjual jika pembeli tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran.

##### **b. Kewajiban Penjual**

Berdasarkan KUHPerdata, antara penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Umumnya dalam hal jual beli, pihak penjual

mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara, pada intinya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua:

- 1) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,
- 2) Kewajiban penjual untuk menanggung atau menjamin (*vrijwaring*) atas barang yang dijual terhadap cacat-cacat tersembunyi.

c. Hak Pembeli

Hak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat dalam Pasal 1481 KUHPerdara:

1) Hak menerima barang

Pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan, sebagaimana termuat dalam pasal 1481 KUHPerdara yang berbunyi: *“Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli”* Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Apabila pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyatanya, agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut sesuai pada Pasal 1475 KUHPerdara.

2) Hak menunda pembayaran

Hak menanggukkah/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang di alami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Hak menunda pembayaran ini terjadi pada benda tidak bergerak misalnya pada pelaksanaan jual beli tanah. Seperti pada Pasal 1516 KUHPdata menyebutkan

*“Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atas suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaanya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.”*

d. Kewajiban Pembeli

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian diaman jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm 257

<sup>20</sup> R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 8.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

### 1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>21</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>22</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>23</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>24</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

<sup>22</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

<sup>23</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48

<sup>24</sup> Ibid, hlm 49

karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

## 2. Teori Tanggung Jawab dalam Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Contohnya adalah seorang penjual sengaja menerlambatkan pengirimannya karena stock barang dagangannya habis.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). Berdasarkan teori ini kelalaian penjual yang berakibat pada munculnya kerugian pembeli merupakan faktor penentu adanya hak pembeli untuk mengajukan

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503



gugatan ganti rugi kepada penjual. Contohnya adalah penjual salah mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli.

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya (barang dagangannya).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

#### **1. Pengertian Wanprestasi**

- a. Menurut KUHPdata

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur.<sup>26</sup>

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- a. Kesengajaan;
- b. Kesalahan;
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

---

<sup>26</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 108

Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

b. Menurut Pendapat Para Ahli

1) Dr. Wirjono Prodjodikoro SH.

Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>27</sup>

2) Prof. R. Subekti SH.

Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hal 17.

<sup>28</sup> R. Subekti, Op.cit, hal 50.

4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

3) Mariam Darus Bardulzaman SH.

H. Mariam Darus Badrulzaman SH, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji.<sup>29</sup>

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai wanprestasi, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

*“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

## **2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Empat keadaan tersebut yaitu:<sup>30</sup>

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

---

<sup>29</sup> Mariam Darus Badrulzaman, 2003, *KUHPerdata Bukum III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.

<sup>30</sup> Komariah, Op.cit, hlm. 127

- b. Debitur terlambat memenuhi prestasi;
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna;
- d. Debitur melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau isi perikatan.

### **3. Sanksi Apabila Debitur Wanprestasi**

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka debitur dapat dikenai sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman:<sup>31</sup>

- a. Dipaksa untuk memenuhi perikatan;
- b. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur;
- c. Pembatalan / pemecahan perikatan;
- d. Peralihan risiko;
- e. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di pengadilan.

### **4. Upaya Hukum Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi**

Terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

Namun dari seluruh upaya tersebut, apabila debitur telah diberi sanksi perdata oleh pengadilan, maka dihukum membayar biaya perkara saja.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online (E-Commerce)**

##### **1. Pengertian Jual Beli Online atau Transaksi *E-Commerce***

Jual beli online atau transaksi *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. *E-commerce* juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*“. Pada transaksi jual beli online (*e-commerce*), para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.<sup>33</sup>

Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badrulzaman memberikan definisi e-commerce sebagai berikut:<sup>34</sup>

*“electronic commerce, or e-Commerce as it is also known is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similiar contractual relationships for the supply of goods, sevicees or the*

---

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 283

<sup>34</sup> Mariam Darus Badrulzaman, 2011, *Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan Dari Aspek Hukum Perdata, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 283

*acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (Closed System). The public network or system must be considered an open system (e.g the internet or the world wide web), the transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements”*

(Transaksi e-commerce adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau World Wide Web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari e-commerce, yaitu:

- a. Ada kontrak dagang
- b. Kontrak tersebut dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW
- f. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.

## **2. Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli Online**

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini:<sup>35</sup>

- a. *Bussines to bussines*, transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan

---

<sup>35</sup> Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 227

bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.

- b. *Bussines to customer*, transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.
- c. *Customer to customer*, transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu lain yang akan saling menjual barang.
- d. *Customer to bussines*, transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. *Customer to government*, transaksi jual beli yang dilakukan dengan pemerintah, seperti dalam pembayaran pajak.

Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan dan bahkan antara individu dengan pemerintah. Syaratnya para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual beli.

Namun dalam jual beli di media sosial Instagram, jenis transaksi jual beli online yang sering terjadi adalah antara *customer to customer* atau antara individu dengan individu.

### 3. Para Pihak dalam Jual Beli Online

Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya, apakah semua proses transaksi dilakukan secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara *online*, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran. Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* terdiri dari:<sup>36</sup>

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet.
- b. Konsumen, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk melalui pembelian secara online.
- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan pembeli) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah perantara yang meneruskan tagihan kepada pemberit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang atau jasa.

---

<sup>36</sup> Didik M Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hlm. 152-154



- d. *Issuer*, perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu.
- e. *Certification Authorities*, pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuee* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.

Namun dalam hal jual beli online di media sosial Instagram, transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara online, dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual, maka pihak *acquirer*, *issuer*, dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Di samping pihak tersebut di atas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman barang.

Fenomena transaksi *e-commerce* ini kemudian berkembang menjadi sebuah tren bisnis yang melahikan salah satu metode penjualan terbaru yaitu *dropshipping*. *Dropshipping* mirip dengan metode penjualan eceran, uniknya pelaku *dropshipping* (*dropshipper*) tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. *Dropshipper* menjalin kerjasama bisnis dengan perorangan atau perusahaan grosir (*wholesaler*), yang merupakan pemasok dari produk yang dijual oleh si *dropshipper*. Seluruh permintaan produk yang didapat dari pembeli diteruskan kepada perusahaan grosir. Pihak perusahaan grosir inilah yang nantinya akan mengirimkan pesanan kepada pembeli.

Yang dilakukan seorang *dropshipper* hanyalah menyebarluaskan informasi produk kepada pembeli. Ketika *dropshipper* mendapatkan

pembeli, ia akan meneruskan pesanan kepada grosir (*supplier*). *Dropshipper* hanya menawarkan produk kepada pembeli, tanpa perlu menyetok produk.

#### 4. Prosedur Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli secara online, perintah pembayaran (payment instruction) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (cardholder) dan penjual (merchant). Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. Cara pembayaran yang sering dilakukan dengan menggunakan kartu kredit (credit card) seperti BCA Card atau Master Card, kartu debit (debit card), cek pribadi (personal check), atau transfer antara rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat diperjual-belikannya produk atau jasa tersebut.<sup>37</sup>

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan pembayaran melalui internet, yaitu:<sup>38</sup>

- a. *Security*: data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif semacam nomor kartu kredit dan password tidak boleh sampai “dicuri” oleh yang tidak berhak karena dapat disalahgunakan di kemudian hari.
- b. *Confidentiality*: perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi, kecuali pihak-

---

<sup>37</sup> Muhammad Aulia Adnan, 2008, *Aspek Hukum Protocol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Elektronik Transaction (SET)*, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 54.

<sup>38</sup> Indrajid, 2009, *E-Commerce*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80.

pihak yang memang secara hukum harus mengetahuinya (misalnya bank).

- c. *Integrity*: sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama.
- d. *Authentication*: yaitu proses pengecekan kebenaran. Di sini pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi, seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak.
- e. *Authorization*: mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang pembeli untuk melakukan pembelian (adanya dana yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli).
- f. *Assurance*: kondisi ini memperlihatkan kepada konsumen agar merasa yakin bahwa merchant yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet (tidak melanggar hukum, memiliki sistem yang aman, dan sebagainya).

Jadi secara umum prosedur jual beli secara online khususnya melalui media sosial Instagram dilakukan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Pembeli menentukan spesifikasi barang yang akan dibeli (biasanya gambar barang atau contoh barang dipampang disuatu situs);

---

<sup>39</sup> Imam Mustofa, “*Transaksi Elektronik (E - Commerce) Dalam Perspektif Fikih*”, Jurnal Hukum Islam, (Pekalongan : Stain Pekalongan, Volume 10, No. 2, Desember 2012), hlm. 150

- b. Pembeli melakukan pemesanan barang tertentu sesuai harga yang tertera dan menginformasikan nama, alamat lengkap, serta nomor telepon kepada penjual;
- c. Pembeli membayar harga sesuai dengan kesepakatan, biasanya dengan cara transfer yang melibatkan pihak bank atau melalui internet atau sms banking.

##### **5. Regulasi Terkait Jual Beli Online / E-Commerce**

Saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang transaksi jual beli online. Undang-Undang yang mengatur tentang transaksi melalui media elektronik yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pada dasarnya masihlah banyak mengacu pada KUHPer yang telah ada, yaitu tentang perjanjiannya dan syarat-syarat perjanjiannya, namun jika ditelisik lebih dalam tidaklah sedikit hambatan-hambatan yang dari KUHPer tersebut tidak dapat menyelesaikannya, sebut saja salah satu contoh adalah tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli secara online, dimana masing-masing pihak tidaklah *face to face* (tidak saling tatap muka) dan serta *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli) disini KUHPer secara umum hanyalah menjelaskan perjanjian jual beli secara umum dan tidak secara menyeluruh tentang *e-commerce* dan oleh karena itu pada tahun 2008 Pemerintah

menerbitkan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan UU. No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.<sup>40</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 s/d. Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Pihak yang dirugikan punya hak untuk menuntut ke pengadilan karena telah diatur dalam Pasal 38 UU ITE dan Pasal 65 ayat (5) UU Perdagangan yang menjelaskan setiap orang yang dirugikan dalam terselenggaranya transaksi elektronik dapat mengajukan gugatan. Upaya pembeli untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui media online dapat dilakukan melalui cara :

---

<sup>40</sup> Sukarmi, 2008, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pusaka Sastra, Bandung, hlm. 66

a. Litigasi, Sesuai dengan pasal 65 ayat (5) UU Perdagangan yang juga diperluas dalam pasal 38 UU ITE yang menjelaskan para pihak dapat menggugat ke pengadilan apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE maka alat-alat bukti yang apat digunakan oleh pembeli di pengadilan adalah :

- 1) Bukti transfer atau bukti pembayaran
- 2) SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian
- 3) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha

b. Non Litigasi, Pada pasal 65 ayat (5) UU Perdagangan dan pasal 39 ayat (2) UU ITE yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri. Masing-masing badan ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

## **E. Tinjauan Mengenai Media Sosial Instagram**

### **1. Pengertian Media Sosial Instagram**

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 atau 16:9 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak. Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau iPod Touch versi apapun dengan sistem operasi iOS 7.0 atau yang terbaru, telepon genggam Android apapun dengan sistem operasi versi 2.2 (Froyo) ke atas, dan Windows Phone 8. Aplikasi ini dapat diunggah melalui Apple App Store dan Google Play. Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa Facebook setuju mengambil alih Instagram dengan nilai sekitar \$1 miliar.<sup>41</sup>

Nama Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata "insta" berasal dari kata "instan", seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan

---

<sup>41</sup> Wikipedia, 2012, *Pengertian Instagram*, <http://id.wikipedia.org/wiki/instagram>, diakses pada 26 Maret 2019

cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan Internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram merupakan lakuran dari kata instan dan telegram. Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera iDevice ataupun foto-foto yang ada di album foto di iDevice tersebut.<sup>42</sup>

## **2. Perkembangan Media Sosial Instagram di Indonesia**

Dilansir dari Kompas.com Indonesia menjadi negara dengan pengguna Instagram terbesar se-Asia Pasifik. Dari 700 pengguna aktif bulanan alias monthly active user (MAU) yang diraup Instagram secara global, 45 juta di antaranya berasal dari Indonesia. Angka 45 juta MAU menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan Januari 2016 yang pada saat itu MAU Instagram di Indonesia hanya 22 juta.<sup>43</sup>

Perdagangan berbasis sosial media diprediksi terus tumbuh mengingat banyak pedagang yang berencana menggunakan platform ini dalam beberapa bulan ke depan. Asia Social Commerce Report menunjukkan 95% responden di Tiongkok akan mengadopsi perdagangan berbasis sosial media, disusul Hong Kong dengan 88% responden, dan Indonesia sebanyak 83% responden. Ada tiga alasan utama yang menyebabkan perdagangan

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Fatimah Kartini Bohang dalam Kompas, 2017, *Indonesia, Pengguna Instagram Terbesar se-Asia Pasifik*, <https://tekno.kompas.com>, diakses pada 26 Maret 2019



berbasis media sosial semakin menjadi andalan. Sekitar 63% responden di Asia menilai perdagangan berbasis media sosial lebih mudah meraih pasar potensial yang lebih luas. Sebanyak 57% responden menilai lebih gampang membuka bisnis melalui media sosial. Sementara itu, sebanyak 48% responden memilih platform media sosial karena dapat meningkatkan jaringan teman dan kenalan yang bisa mendorong pertumbuhan bisnisnya.<sup>44</sup>

### **3. Kelebihan dan Kekurangan Media Sosial Instagram Dibandingkan dengan Media Sosial Lainnya**

Setiap media sosial mempunyai kelebihan dan kekurangan, salah satunya adalah Instagram. Dilansir dari Kompasiana.com oleh Leon Mark<sup>45</sup> kelebihan dan kekurangan instagram dibandingkan media sosial lainnya yakni:

#### **a. Kelebihan Instagram:**

- 1) Bersifat privasi. Jika kita ingin orang lain tidak bisa melihat apa isi instagram kita, maka kita bisa mengunci akun instagram milik kita.
- 2) Instagram memiliki beragam fitur untuk mengedit foto kita.
- 3) Instagram juga memiliki fitur *Direct Message*, yaitu fitur chat antar pengguna Instagram

---

<sup>44</sup> Hari Widowati dalam Katadata, 2018, *Pedagang Indonesia Paling Banyak Manfaatkan Instagram dan Facebook*, <https://katadata.co.id>, diakses pada 26 Maret 2019

<sup>45</sup> Leon Mark dalam Kompasiana, 2015, *Kelebihan dan Kekurangan Instagram*, <https://www.kompasiana.com>, diakses pada 19 Oktober 2019

4) Instagram menyantumkan *Follower* (pengikut) dan *Following* kita (akun yang kita ikuti).

5) Mudah untuk melakukan promosi, baik dalam hal kegiatan sosial, organisasi, maupun jual beli.

b. Kekurangan Instagram:

1) Instagram hanya mempunyai 2 kontes saja yaitu foto dan video.

2) Durasi video maksimal hanya 1 menit.

3) Instagram harus diupdate secara berkala.

#### **4. Perbedaan Media Sosial dengan Online Shop**

Dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, Bisnis Online sangat banyak diminati oleh masyarakat. Bisnis Online adalah tipe bisnis/pekerjaan dimana kegiatan penjualan dan pembelian produk atau layanan dilakukan secara online atau menggunakan media internet dan teknologi. Namun, ada yang membedakan antara berbisnis online melalui sosial media dengan website online shop.

Yang pertama yaitu Media Sosial, banyak sekali tipe media sosial yang ada saat ini. Media sosial merupakan salah satu tempat membangun citra diri seseorang di depan orang lain. Pembangunan popularitas dan eksistensi diri inilah yang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi kebanyakan orang sosial media digunakan oleh para pembisnis online sebagai media untuk berjualan produk mereka, dikarenakan aksesnya yang mudah dan simple serta gratis untuk menggunakannya. Beberapa sosial media yang bisa terbilang besar saat ini diantaranya Facebook, Twitter, Google+, dan

Instagram. Namun, sebenarnya media sosial itu bukan media untuk melakukan jual/beli melainkan alat bantu untuk melakukan promosi dan penjelasan produk saja. Tujuan dari sosial media tersebut adalah meningkatkan konsumen dengan cara melakukan promosi agar konsumen mengenal produk dengan melihat hasil postingan anda di sosial media. Yang kedua adalah *Online Shop*, berbeda dengan media sosial, berdasarkan pengamatan yang ada, banyak jasa pembuatan toko online atau biasa disebut “*online shop*” merupakan suatu situs online yang dimana pembeli dan penjual tidak melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran di terima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Danis Puntoadi, 2011, *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*, PT Elex. Komputindo, Jakarta